

**ANALISIS KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**Muhammad Ridha<sup>1</sup>, Zulfatmi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

[muhammaadridha@gmail.com](mailto:muhammaadridha@gmail.com)<sup>1</sup>, [zulfatmibudiman@ar-raniry.ac.id](mailto:zulfatmibudiman@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>

---

***ABSTRACT;** Quality assurance in higher education is designed to ensure the quality of education offered. For this reason, universities are required to implement a structured quality assurance process within the framework of the Higher Education Quality Assurance System, which is aligned with the National Higher Education Standards. There are two types of quality assurance in higher education, namely internal and external. Internal quality assurance is conducted independently and autonomously to continuously and consistently improve the quality of education. In contrast, external quality assurance involves assessment from external parties to assess the feasibility of higher education institutions. This research aims to provide a clear view of the quality assurance system in higher education. The method used is qualitative with a literature review approach taken from books and journal articles. The results reveal the various policies and procedures needed to implement quality assurance in higher education. With a deep understanding of the quality assurance system, it is expected that universities can implement it effectively.*

***Keywords:** Policy, Quality Assurance, Higher Education Institution.*

**ABSTRAK;** Penjaminan mutu di perguruan tinggi dirancang untuk menjamin kualitas pendidikan yang ditawarkan. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan menerapkan proses penjaminan mutu secara terstruktur dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang diselaraskan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Terdapat dua jenis penjaminan mutu di perguruan tinggi, yakni internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan secara independen dan otonom untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan dan konsisten. Sebaliknya, penjaminan mutu eksternal melibatkan penilaian dari pihak luar untuk menilai kelayakan institusi perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang jelas tentang sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian literatur yang diambil dari buku dan artikel jurnal. Hasilnya mengungkapkan berbagai kebijakan dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan penjaminan mutu di perguruan tinggi. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap sistem penjaminan mutu, diharapkan perguruan tinggi dapat menerapkannya dengan efektif.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Penjaminan Mutu, Perguruan Tinggi.

## PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi di Indonesia menghadapi kenyataan bahwa indikator sukses dan kualitas pendidikan ditentukan serta diawasi oleh berbagai pihak. Pemerintah melalui sistem Akreditasi Perguruan Tinggi dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) terus memonitor perkembangan Perguruan Tinggi untuk memberikan status tingkat mutu yang dapat menjamin kualitas layanan pendidikan untuk masyarakat. Selain itu, lembaga seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni juga memiliki standar tersendiri terkait kesuksesan perguruan tinggi tersebut. Pengguna lulusan dan orang tua pun memiliki harapan dan pandangan yang mungkin berbeda satu sama lain.

Keberhasilan sebuah perguruan tinggi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti pencapaian status akreditasi unggul, kemampuan menghasilkan lulusan yang diminati oleh pasar kerja, serta pengembangan sumber daya manusia baik di kalangan tenaga pengajar maupun staf pendukung agar lebih berprestasi dan meningkat dalam kemampuan serta pendapatan. Selain itu, keberhasilan dalam menerbitkan berbagai karya ilmiah yang diakui reputasinya dan kemampuan dalam menggerakkan organisasi guna menciptakan masyarakat yang mandiri dan berpikiran maju melalui pengabdian masyarakat juga merupakan indikator penting. Semua ini, bersama dengan berbagai prestasi lainnya, berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu yang disediakan oleh perguruan tinggi tersebut.

Setiap hari, perguruan tinggi berinteraksi dengan mahasiswa yang berperan sebagai konsumen utama dalam menikmati seluruh rangkaian pendidikan. Namun, pandangan, evaluasi, dan kepuasan dari mahasiswa sering kali sulit untuk dilihat atau diukur. Ada banyak alasan mengapa pihak penyelenggara pendidikan meragukan hasil survei kepuasan. Salah satunya adalah tingkat kedewasaan mahasiswa yang dianggap belum cukup untuk memberikan penilaian objektif terhadap proses belajar dan kualitas secara keseluruhan. Selain itu, waktu luang yang terbatas membuat mahasiswa kurang berminat untuk serius mengisi kuesioner kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, untuk menilai kualitas atau keberhasilan penjaminan mutu di perguruan tinggi, perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain.

Kegiatan operasional Perguruan Tinggi (PT) tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan melalui Sistem Penjaminan Mutu (SPM), baik itu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Proses SPMI yang berkaitan dengan SPME dilaksanakan dalam siklus yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).<sup>1</sup> Pemerintah, melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), juga menetapkan komponen-komponen yang diperlukan untuk pengakuan mutu sebuah perguruan tinggi. Selain itu, terdapat 24 standar minimal dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diwajibkan pemerintah untuk dipenuhi oleh semua perguruan tinggi di Indonesia.<sup>2</sup>

Penjaminan mutu dalam perguruan tinggi merupakan suatu proses yang sistematis dalam merencanakan, memenuhi, mengontrol, dan mengembangkan standar yang ditetapkan secara konsisten untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan memuaskan bagi semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal seperti mahasiswa, dosen, staff, masyarakat, bisnis, asosiasi profesi, dan pemerintah. Penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah sebuah keharusan sesuai dengan berbagai peraturan yang diamanatkan oleh Undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Inti dari UU Dikti adalah penjaminan mutu. Dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk membangun sistem pengawasan horisontal pada setiap unit pendidikan untuk menerapkan dan menjalankan sistem penjaminan mutu pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tinggi dapat memenuhi bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<sup>3</sup>

Di sektor pendidikan, para pembuat kebijakan yang bertindak sebagai penyedia dana memiliki kewajiban untuk mengalokasikan investasi mereka secara efektif. Untuk ini,

---

<sup>1</sup> Fadlil, Abdul, and Ryan Fitriani Pahlevi. "Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menggunakan MOORA, SAW, WP, dan WSM." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5.2 (2021): hal. 350

<sup>2</sup> Dewi, Yuli Kartika. "Faktor pendukung keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi." *Jurnal Manajemen* 14. 1 (2018): hal. 38

<sup>3</sup> DAN, BADAN PENJAMINAN MUTU. "*Sistem Penjaminan Mutu Internal.*" Universitas SAHID. (2018): Hal. 3-4

penting bagi pemerintah untuk mendirikan lembaga penjaminan mutu. Ini menunjukkan peran serta pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia suatu negara. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan proses sistematis untuk continuously meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana. Artikel ini mengeksplorasi regulasi yang berkaitan dengan penjaminan mutu di perguruan tinggi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia memenuhi standar tinggi dan mengalami peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah melalui studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari buku, jurnal, dan studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, seperti literatur mengenai manajemen mutu, penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal. Langkah-langkah dalam proses penelitian ini dimulai dengan seleksi artikel yang relevan dengan penjaminan mutu di perguruan tinggi untuk diklasifikasikan dan dianalisis lebih jauh. Kemudian, identifikasi dan pengembangan kategori sistematis dilakukan, diikuti dengan penelaahan mendalam dan ekstraksi data dari artikel-artikel tersebut untuk dianalisis dan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi Penjaminan Mutu

Pemerintah, sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, telah menetapkan definisi khusus mengenai Penjaminan Mutu. Berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – Dikti 2003, Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi didefinisikan sebagai proses yang sistematis dalam menetapkan dan memenuhi standar mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Proses ini bertujuan agar semua pihak yang terlibat, termasuk mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang dan berbagai pihak terkait lainnya, dapat merasa puas

---

<sup>4</sup> Amiroh, Faridatul, and Setyo Admoko. "Tinjauan Terhadap Model-Model Pembelajaran Argumentasi Berbasis TAP Dalam Meningkatkan Keterampilan Argumentasi dan Pemahaman Konsep Fisika Dengan Metode Library Research." *Inovasi Pendidikan Fisika* 9.2 (2020): 211.

dengan layanan yang diberikan.<sup>5</sup> Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012 pasal 52, dijelaskan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebuah proses sistematis yang bertujuan untuk secara terencana dan kontinu meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.<sup>6</sup> Dalam Regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dengan nomor 53 tahun 2023, ditegaskan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan serangkaian aktivitas yang sistematis untuk secara terus-menerus dan terencana meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, atau SN Dikti, merupakan kumpulan standar yang mencakup standar nasional pendidikan yang diperluas dengan standar untuk penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, atau SPM Dikti, adalah sistem yang terdiri dari berbagai elemen dan proses yang saling terkait dan terorganisir untuk secara berkelanjutan dan terencana memastikan serta meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Penjaminan mutu di bidang ini dilaksanakan melalui tahapan penetapan, implementasi, evaluasi, pengawasan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi terkait. Standar yang dirujuk mencakup SN Dikti serta standar yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.<sup>7</sup>

Beberapa pakar memberikan pandangan mengenai apa itu Penjaminan Mutu. Hedwig dan Polla berpendapat bahwa Mutu seringkali dilihat sebagai tingkatan keunggulan layanan yang mencakup mutu desain dan kesesuaian. Dalam konteks perguruan tinggi, Penjaminan Mutu merupakan layanan yang disediakan kepada para pemangku kepentingan seperti mahasiswa, alumni, industri yang mempekerjakan lulusan, dan orang tua mahasiswa.<sup>8</sup> Selanjutnya, Wijatno mendefinisikan Penjaminan Mutu sebagai proses yang menetapkan dan memenuhi standar mutu yang konsisten dan berkelanjutan, yang pada akhirnya memberikan kepuasan baik bagi konsumen, produsen, maupun pihak lain yang terlibat.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – Dikti 2003

<sup>6</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 2012

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

<sup>8</sup> Hedwig, Rinda, and Gerardus Polla. "Model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2006).

<sup>9</sup> Wijatno, Serian. *Pengelolaan perguruan tinggi secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan*. Penerbit Salemba Empat, 2009.

Dalam bukunya, Sower juga menjelaskan Penjaminan Mutu sebagai berikut, yaitu “*Quality Assurance (QA) is a broad concept that focuses on the entire quality system, including suppliers and ultimate consumers of the product or service. It includes all activities designed to produce products and services of appropriate quality*”<sup>10</sup> (Penjaminan mutu adalah konsep luas yang berfokus pada keseluruhan sistem kualitas, termasuk pemasok dan konsumen akhir dari sebuah produk atau layanan. Penjaminan mutu mencakup semua aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan produk dan layanan dengan kualitas yang sesuai).

## **2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, terdapat ketentuan baru mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal yang beroperasi secara otonom di setiap perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan melalui proses Akreditasi untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.<sup>11</sup>

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sebuah proses yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk secara mandiri dan otonom menjamin kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Ini bebas dari intervensi eksternal dan bertujuan untuk terus menerus meningkatkan standar pendidikan tinggi. Setiap institusi pendidikan tinggi berkesempatan untuk merancang dan mengimplementasikan audit mutu internal mereka sendiri yang sesuai dengan sejarah dan filosofi dari pendirian lembaga tersebut.<sup>12</sup> Lembaga audit mutu internal di universitas memiliki peran untuk mengawasi, mengontrol, dan menilai pelaksanaan aktivitas akademik di institusi tersebut. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, lembaga ini

---

<sup>10</sup> Sower, Victor E. *Essentials of quality with cases and experiential exercises*. John Wiley & Sons, 2010.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

<sup>12</sup> Bhakti, Yoga Budi, and Achmad Ridwan. "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu* 8.02 (2022): 248.

mengikuti panduan yang sudah ditetapkan agar proses pemeriksaan mutu internal berlangsung sesuai dengan standar yang ada.

Sistem Penjaminan Mutu Internal mewakili terobosan dalam manajemen institusi pendidikan tinggi. Ini memberi kesempatan kepada universitas-universitas, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang sedang berkembang, untuk terus memperbaiki kualitas mereka berdasarkan hasil dari audit mutu internal. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan standar kualitas pendidikan tinggi secara umum.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan metode yang digunakan untuk memastikan dan mencapai standar kualitas dalam pendidikan tinggi. Sistem ini dijalankan secara independen tanpa campur tangan dari pihak eksternal, serta diimplementasikan secara terus-menerus dan konsisten guna meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah proses menilai dan memberikan akreditasi kepada institusi pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.<sup>13</sup> Penjaminan mutu eksternal sangat krusial untuk universitas untuk menilai sejauh mana institusi tersebut memenuhi standar kualitas yang telah disetujui. Implementasi dari penjaminan mutu eksternal juga bertindak sebagai mekanisme pertanggungjawaban pengelola universitas kepada semua pihak yang berkepentingan.

Tasopoulou & Tsiotras juga mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai *the process of ranking by comparing on standard criteria*.<sup>14</sup> Ini adalah prosedur yang memberikan penilaian dengan cara membandingkan relatif terhadap standar yang telah ditentukan. Selama prosedur ini, objek atau subjek dinilai dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang spesifik sebagai standar perbandingan. Penjaminan mutu eksternal memiliki tujuan untuk membantu pengembangan perguruan tinggi serta menyediakan rekomendasi dan saran untuk peningkatan kualitas dalam arah yang lebih positif.

Untuk memastikan proses penjaminan mutu eksternal berjalan dengan lancar dan transparan, harus ada pelaksanaan oleh asesor yang berkompeten dan ahli di bidangnya.

---

<sup>13</sup> Riset, K., & Pendidikan Tinggi, D. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 2016

<sup>14</sup> Tasopoulou, Konstantina, and George Tsiotras. (2017) "Benchmarking towards excellence in higher education." *Benchmarking: An International Journal* 24.3: 622

Asesor tersebut harus memiliki kompetensi profesional, kemampuan untuk memeriksa dengan teliti dan sistematis, kemampuan analisis situasi yang baik, kemampuan manajerial, serta kompetensi interpersonal yang memadai.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penjaminan mutu eksternal adalah metode penilaian yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan tinggi dengan mengacu pada pedoman atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini sangat vital dalam menilai apakah suatu lembaga telah mencapai standar mutu yang diharapkan serta bertindak sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para stakeholder. Tujuannya adalah untuk menyampaikan saran demi peningkatan kualitas universitas tersebut.

### **3. Tujuan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

Penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah kunci untuk memastikan standar dan peningkatan pendidikan secara berkelanjutan. Tujuan utama dari penjaminan mutu meliputi beberapa aspek berikut:<sup>16</sup> 1. Pemantapan Kualitas Edukasi: Penjaminan mutu bertujuan untuk terus memelihara dan mengangkat standar pendidikan, menjadikan mahasiswa lulus dengan keterampilan yang relevan dan diharapkan oleh pasar kerja serta masyarakat. 2. Responsibilitas dan Keterbukaan: Melalui penjaminan mutu, universitas menunjukkan tanggung jawabnya kepada para stakeholder, termasuk mahasiswa, staf pengajar, dan masyarakat luas, serta mematuhi hukum dan standar akademis yang ada. 3. Dukungan Finansial: Sistem penjaminan mutu yang efektif membuka pintu lembaga pendidikan untuk mendapatkan dukungan finansial dari badan-badan pemerintah atau swasta dengan menunjukkan dedikasi mereka terhadap pendidikan berkualitas. 4. Kemajuan Inovasi: Penjaminan mutu memicu adanya perbaikan berkelanjutan dan inovasi dalam pendidikan dengan mengaplikasikan best practices dan evaluasi yang sistematis. 5. Informasi yang Konsisten untuk Stakeholders: Sistem penjaminan mutu memberikan data yang konsisten mengenai standar pendidikan, memungkinkan masyarakat untuk melakukan perbandingan kualitas antar institusi pendidikan tinggi. 6. Pencegahan Masalah Pendidikan: Mekanisme

---

<sup>15</sup> Cheung, P. P. T., & Tsui, C. B. S. (2010). Quality Assurance for All. *Quality in Higher Education*, 16(2), 170

<sup>16</sup> <https://mutuperguruantinggi.id/pentingnya-penjaminan-mutu-di-perguruan-tinggi-strategi-tujuan-dan-mekanisme-implementasi/>

penjaminan mutu yang efektif membantu dalam mengawasi dan mengevaluasi, sehingga mampu menghindari masalah dalam proses pendidikan yang bisa merugikan mahasiswa dan institusi. 7. Pengembangan Budaya Mutu: Penjaminan mutu juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap budaya mutu di kalangan seluruh stakeholder universitas, termasuk manajemen akademik dan non-akademik.

Penjaminan mutu di institusi pendidikan tinggi tidak hanya terbatas pada pengawasan kualitas tetapi juga merupakan elemen krusial dari dedikasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kesesuaian lembaga pendidikan dalam mengatasi tantangan global.

#### **4. Peran dan Tugas Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi**

Mutu adalah janji yang dipegang oleh institusi pendidikan tinggi terhadap mereka yang memanfaatkan layanannya. Karena itu, institusi tersebut bertanggung jawab untuk memastikan tingkat keunggulan dalam proses pembelajaran dan penilaian mereka. Di Indonesia, Sistem Penjaminan Mutu Internal diimplementasikan dan diawasi secara berkelanjutan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Menurut Wijatno dalam karyanya, penjaminan mutu merupakan strategi yang terorganisir untuk menjamin pekerjaan memenuhi standar berikut: visi dan misi organisasi dipahami oleh semua anggota; sistem dirancang dengan cermat, minim kesalahan dan disampaikan secara efektif ke semua pihak; tanggung jawab setiap individu ditetapkan dengan jelas; kriteria mutu dijelaskan dan didokumentasikan dengan rinci; terdapat mekanisme untuk memverifikasi kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan; dan prosedur untuk mengatasi kesalahan telah disiapkan.<sup>17</sup>

Sedang menurut Hedwig dan Polla, Pusat/Biro/Unit/Kantor Penjaminan Mutu memiliki posisi yang strategis dan berperan penting dalam mengawasi seluruh proses yang berlangsung. Fungsi utamanya adalah memastikan kualitas proses terjaga, mengamati interaksi antar unit, mengorganisir pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas perihal penjaminan mutu, menyampaikan laporan berkala tentang kemajuan dan tantangan dalam pelaksanaan penjaminan mutu, mengidentifikasi potensi penyimpangan melalui panel

---

<sup>17</sup> Wijatno, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis*, 2009

auditor atau MonEvIn, melakukan evaluasi yang berdampak pada kualitas, serta menanggapi saran dari pihak stakeholder untuk dijadikan aksi perbaikan.<sup>18</sup>

Dari beragam perspektif, tugas utama Penjaminan Mutu adalah untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, eksekusi, pengawasan, serta peningkatan kualitas suatu organisasi. Orang yang bertugas dalam penjaminan mutu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua standar yang telah dirumuskan dan dicatat dalam dokumen resmi, tidak hanya diketahui dan dipahami tetapi juga diterapkan secara efektif oleh semua individu yang terkait dengan proses kualitas. Selanjutnya, penjamin mutu juga melakukan pengawasan reguler untuk memverifikasi bahwa praktik aktual di lapangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta menginisiasi berbagai inisiatif untuk melakukan peningkatan kualitas.

## 5. Faktor yang Mempengaruhi Penjaminan Mutu

Mengingat peran vital dari Penjaminan Mutu untuk institusi, penting untuk menyelidiki dan mengenal faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di universitas.

Dalam struktur organisasi, disarankan agar Penjaminan Mutu berposisi langsung di bawah Rektor jika berada di level universitas, atau di bawah Dekan jika beroperasi di level fakultas. Faktor utama yang mendukung suksesnya implementasi sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan tinggi mencakup: a) Komitmen dari semua pemimpin universitas, b) Komitmen dari manajemen universitas, c) Komitmen dari setiap individu yang terlibat dalam menjalankan sistem ini, d) Konsistensi yang harus selalu dijaga dalam setiap aktivitas dan pengambilan keputusan, e) Ketersediaan data yang akurat dan dapat diandalkan untuk setiap keputusan yang dibuat.<sup>19</sup>

Di dalam artikel yang ditulis oleh Dewi<sup>20</sup> yang dikutip dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi, dan

---

<sup>18</sup> Hedwig, Rinda, and Gerardus Polla. "Model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2006).

<sup>19</sup> Hedwig, Rinda, and Gerardus Polla. "Model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi." *Yogyakarta: Graha Ilmu* (2006).

<sup>20</sup> Dewi, Yuli Kartika. "Faktor pendukung keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi." *Jurnal Business Management* (1 ), (2018): 40-41.

Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan sulitnya implementasi mutu internal dalam upaya penjaminan mutu di lembaga pendidikan tinggi, yang antara lain meliputi: a) Minimnya pemahaman dari anggota civitas akademika di universitas, b) Inkonsistensi, kurangnya loyalitas dan komitmen dari para pemimpin universitas, c) Perbedaan pandangan antara Yayasan dan manajemen universitas, d) Lemahnya kepemimpinan oleh Pejabat Struktural, e) Ketiadaan landasan hukum yang solid untuk penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), f) Kekurangan sosialisasi mengenai dokumen SPMI kepada semua stakeholder, g) Kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap SPMI, h) Kebiasaan kerja sumber daya dan manajemen yang tidak mengikuti standar yang sudah ditetapkan, i) Tidak jelasnya batasan wewenang dan tugas pokok fungsi dalam organisasi, j) Terbatasnya sumber daya manusia yang berkomitmen dan mengerti SPMI, k) Kurangnya dukungan teknologi informasi, l) Kekurangan dana untuk membiayai SPMI, m) Kesulitan dalam menetapkan instrumen keberhasilan dalam menjalankan SPMI.<sup>21</sup>

Artikel lain membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penjaminan mutu di universitas, yang meliputi: 1) Kepemimpinan, termasuk komitmen kuat dari pemimpin yayasan dan manajemen universitas; 2) Sumber Daya Manusia, yang melibatkan pemahaman dan kesediaan dari civitas akademika terhadap sistem penjaminan mutu; 3) Sarana pendukung seperti pelatihan, sosialisasi sistem penjaminan mutu, keberadaan lembaga yang mengatur sistem tersebut, dan teknologi pendukung.

## **6. Dampak Penjaminan Mutu Terhadap Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tinggi**

Lembaga pendidikan yang unggul selalu berkomitmen untuk memperbaharui dan mengatasi setiap kelemahan melalui berbagai inovasi, bertujuan untuk peningkatan kualitas di lingkungan mereka. Peningkatan berkelanjutan ini sangat vital dalam menaikkan standar lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Keberhasilan Penjaminan mutu, baik internal maupun eksternal, bergantung pada dukungan dari semua pemangku kepentingan dan kerjasama antar unit di institusi pendidikan tinggi tersebut. Jika hal ini terlaksana, maka penjaminan mutu bisa dilaksanakan

---

<sup>21</sup> (<http://spmri.ristekdikti.go.id>).

dengan efektif dan efisien. Selain itu, untuk memastikan penjaminan mutu yang berkualitas, penting adanya budaya mutu yang positif di dalam lingkungan perguruan tinggi tersebut.

Berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas institusi pendidikan tinggi akan terus berkembang apabila ada budaya mutu yang kuat di institusi tersebut. Budaya mutu yang efektif berasal dari penjaminan mutu yang solid, baik dari dalam maupun luar institusi.<sup>22</sup> Budaya tersebut menekankan pada peningkatan kualitas yang terus-menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan penuh dari para pemangku kepentingan dalam proses penjaminan mutu.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dari Dikti tahun 2003, penjaminan mutu di perguruan tinggi adalah sebuah proses untuk menetapkan dan memenuhi standar mutu yang konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak terkait merasa puas. Sementara itu, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 52 menjelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah aktivitas yang sistematis untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara terencana dan berkesinambungan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudridtek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah kegiatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara berencana dan berkesinambungan. Regulasi terbaru dari Permendikbudridtek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 juga menguraikan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri dari dua bagian: Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem internal bertujuan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara mandiri di setiap perguruan tinggi, sementara sistem eksternal melalui akreditasi untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Keberhasilan dari kedua sistem penjaminan mutu ini sangat bergantung pada dukungan dan kerja sama yang baik antar stakeholder dan unit yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>22</sup> Yingqiang, Z., & Yongjian, S. Quality assurance in higher education: Reflection, criticism, and change. *Chinese Education & Society*, (2016). 49(1-2), 18.

<sup>23</sup> Dzimińska, M., Fijałkowska, J., & Sułkowski, Ł. Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions. *Sustainability*, (2018). 10(8), 42.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amiroh, Faridatul, and Setyo Admoko. 2020 "Tinjauan Terhadap Model-Model Pembelajaran Argumentasi Berbasis TAP Dalam Meningkatkan Keterampilan Argumentasi dan Pemahaman Konsep Fisika Dengan Metode Library Research." *Inovasi Pendidikan Fisika* 9.2
- Bhakti, Yoga Budi, and Achmad Ridwan. 2022 "Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Internal & Eksternal Dalam Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi." *Jurnal Penjaminan Mutu* 8.02
- Cheung, P. P. T., & Tsui, C. B. S. 2010. Quality Assurance for All. *Quality in Higher Education*, 16(2)
- DAN, BADAN PENJAMINAN MUTU. 2018 "Sistem Penjaminan Mutu Internal." Universitas SAHID.
- Dewi, Yuli Kartika. 2018 "Faktor pendukung keberhasilan penerapan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi." *Jurnal Business Manajemen* 14. 1
- Dzimińska, M., Fijałkowska, J., & Sułkowski, Ł. 2018 Trust-based quality culture conceptual model for higher education institutions. *Sustainability*, 10(8)
- Fadlil, Abdul, and Ryan Fitriani Pahlevi. 2021 "Pengambilan Keputusan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menggunakan MOORA, SAW, WP, dan WSM." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 5.2
- Hedwig, Rinda, and Gerardus Polla. 2006 "Model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi." *Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Hildesheim, C., & Sonntag, K. 2020 The Quality Culture Inventory: a comprehensive approach towards measuring quality culture in higher education. *Studies in Higher Education*, 45(4)
- <http://spm.ristekdikti.go.id>
- [https://mutuperguruantinggi.id/pentingnya-penjaminan-mutu-di-perguruan-tinggi\\_strategi-tujuan-dan-mekanisme-implementasi/](https://mutuperguruantinggi.id/pentingnya-penjaminan-mutu-di-perguruan-tinggi_strategi-tujuan-dan-mekanisme-implementasi/)
- Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi – Dikti 2003
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- Riset, K., & Pendidikan Tinggi, D. 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Sower, V. E. 2010. *Essentials of quality with cases and experiential exercises*. John Wiley & Sons.
- Tasopoulou, Konstantina, and George Tsiotras. 2017 "Benchmarking towards excellence in higher education." *Benchmarking: An International Journal* 24.3
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012
- Wijatno, S. 2009. *Pengelolaan perguruan tinggi secara efisien, efektif, dan ekonomis untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusan*. Penerbit Salemba Empat.
- Yingqiang, Z., & Yongjian, S. 2016 Quality assurance in higher education: Reflection, criticism, and change. *Chinese Education & Society*, 49(1-2).